

MODERNISME DAN SEKULARISME DAULAH TURKI UTSMANI SEBELUM ERA MUSTAFA KEMAL ATTATURK

Eka Susanti¹, M. Rizali Rahman²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

hidupberjiwamuda23@gmail.com

rizaliuin346@gmail.com

Abstrak: Daulah Turki Utsmani merupakan salah satu kepemimpinan Negara Islam yang cukup lama berkuasa sejak tahun 1300-1924 M. Fakta sejarah menyatakan bahwa sebenarnya jauh sebelum masa Musttafa Kemal Attaturk sudah ada usaha modernisme dan sekularisme dari para penguasa pemerintah di Daulah Islam Turki Utsmani. Penelitian ini bertujuan untuk bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan sejarah peradaban Islam. Metode penelitian kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini memperoleh hasil bahwa upaya modernisme dan sekularisme pada Daulah Turki Utsmani sudah terjadi jauh sebelum era Mustafa Kemal Attaturk. Simpulan, sistem pemerintahan Daulah Utsmani berubah menjadi sistem Republik Turki di era Mustafa Kemal, yang dianggap bertujuan untuk merubah dan memperbaiki stabilisasi daulah Turki Utsmani pada saat itu.

Kata kunci: Modernisme, Sekulerisme, Daulah Turki Utsmani, Mustafa Kemal Attaturk

Abstract: *The Ottoman Turkish Empire was one of the longest-reigning Islamic states from 1300-1924 AD. Historical facts state that long before Mustafa Kemal Attaturk, there had been efforts of modernism and secularism by the rulers of the government in the Ottoman Turkish Islamic Daulah. This research aims to add to the treasure of knowledge of the history of Islamic civilization. The research method is library research. This study found that the efforts of modernism and secularism in the Ottoman Turkish Empire had occurred long before the era of Mustafa Kemal Attaturk. In conclusion, the Ottoman Daulah government system changed to the Turkish Republic system in the Mustafa Kemal era, which was aimed at changing and improving the stabilization of the Ottoman Turkish Daulah at that time.*

Keywords: *Modernism, Secularism, Ottoman Turkish Empire, Mustafa Kemal Attaturk*

PENDAHULUAN

Sejarah adalah cerminan masa lalu. Sejarah berfungsi sebagai pelajaran bagi orang-orang di masa yang akan datang setelahnya. Pentingnya memahami sejarah Islam, agar umat juga bisa mengambil teladan dari para pejuang di masa lalu dan dapat mengambil hikmah dari kekalahan di masa lalu. Sebagaimana halnya sejarah setiap umat, peradaban Islam juga telah mengalami pasang surut kejayaannya. Dari mulai mengalami pertumbuhan dan perkembangan, kemudian mengalami fase kemajuan dan kejayaan, kemudian mengalami kemunduran bahkan keruntuhannya. Tepat pada masa kekhilafahan atau Daulah Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924 M.

Beberapa sejarah peradaban Islam sendiri, ada tiga masa yang cukup disorot sebagai masa kejayaan peradaban dan pemerintahan Islam, yaitu pada masa Daulah Syafawi di Persia, Daulah Mughal di India, dan Daulah Utsmani di Turki. Dari ketiganya, Daulah Turki Utsmani adalah yang terlama sepanjang sejarah peradaban Islam berkuasa, atau juga dikenal dengan Imperium Islam. Dimana luas wilayah kekuasaan Islam kala itu membentang dari Afrika Utara, Jazirah Arab, Balkan, hingga Asia Tengah. Di masa Daulah Turki Utsmani inilah berbagai suku, bangsa, budaya dan agama hidup dalam satu naungan negara. Daulah Turki Utsmani telah mampu berkuasa selama kurang lebih 7 abad berturut-turut. Berdiri sejak kepemimpinan Utsman bin Ertugrul atau Usman I, mereka tergolong dari suku Kayi, salah satu suku di Turki barat yang terancam gelombang keganasan tekanan dari bangsa Mongol. Namun di bawah kepemimpinan Utsman I, Daulah Turki Utsmani berhasil memukul mundur bangsa Mongol, bahkan berhasil menaklukkan kota Broessa yang berada di daerah perbatasan Bizantium dan menjadikannya sebagai Ibu kota Turki Utsmani.

Sejarah-sejarah perjuangan dan penaklukan terus berlanjut kepada anak cucunya seperti Sultan Muhammad II Al-Fatih, dimana ia berhasil menaklukkan wilayah Konstantinopel pada tahun 1453, yang merupakan benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium dan pusat agama Kristen terbesar kala itu. Karena keberhasilannya ini Sultan Muhammad II ini diberi gelar “*AlFatih*” yang berarti “sang penakluk”. Namun dari sekian kejayaan dan kemenangan yang diraih oleh daulah Turki Usmani, kemunduran dan kehancuran juga tidak dapat dihindari. Namun pada akhirnya pemerintahan Daulah Turki Utsmani ini runtuh pada tanggal 3 Maret 1924, yang kemudian berganti menjadi Negara Republik Turki yang berideologi sekuler oleh Mustafa Kemal Attaturk.

Sebagaimana fakta yang telah banyak diyakini dan diterima oleh umat Islam saat ini bahwa sistem pemerintahan sekuler yang dianut oleh Turki adalah hal baru yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Attaturk, dimana pada masa pemerintahannya-lah sistem pemerintahan Daulah Turki Utsmani yang sebelumnya berasaskan Islam berubah menjadi Republik-Sekuler. Di satu sisi tidak banyak fakta sejarah yang diketahui oleh umat Islam jika sebelum masa keruntuhan Daulah Turki Utsmani era Mustafa Kemal Attaturk tersebut telah banyak upaya modernisme dan sekulerisme dari berbagai gerakan pembaharuan yang terjadi di dalam tubuh Daulah. Hal ini dimulai sejak masa pemerintahan Sultan Salim II hingga masa pemerintahan Sultan Abdul Majid II.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti Gerakan Modernisasi dan Sekularisasi yang ada di masa Daulah Turki Usmani sebelum berdirinya Negara Republik Turki Sekuler yang didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Dengan mengumpulkan berbagai data-data pustaka, dengan cara membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Data didapatkan dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, serta berbagai sumber lainnya seperti website internet, (Wirata, 2014). Pendekatan sejarah menggunakan metode deskriptif-historis, melalui sumber buku, jurnal, serta artikel yang relevan, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu; tahap heuristik, kritik atau verifikasi, Interpretasi, dan historiografi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Modernisme

Modernisme diambil dari kata “*modern*” dan “*isme*”. Modern yang artinya baru, terbaru, atau sekarang, (John, 1992). Sedangkan isme yang berarti suatu paham, ajaran, kepercayaan, cita-cita, dan ideologi, (Ismail, 1970). Maka modernisme sendiri adalah sebuah paham atau ajaran terbaru, secara global kata modernisme dapat dijumpai di berbagai masyarakat beragama di dunia. Menurut Harun Nasution, kata modernisme dapat diterjemahkan seperti *Al-Tajdid* atau pembaharuan, (Engku & Zubaidah, 2014). Namun kata modernisme hubungannya dalam Islam masih banyak diperbincangkan dan menjadi perdebatan baik dikalangan para ulama dan intelektual (Firdaus, 2018).

Modernisme sendiri bukan berasal dari istilah bahasa masyarakat muslim, kata ini muncul dari kalangan akademisi Barat dimana pada awalnya kata ini merupakan penafsiran terhadap doktrin agama Kristen agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan modern. Dimana sikap modern itu datang dari wilayah Eropa sejak abad ke-18 yang sering disebut sebagai revolusi industri di Inggris, dan revolusi kemanusiaan di Perancis (Hadiwijono, 1980). Menurut pandangan Maryam Jameelah istilah modernisme adalah sebagai pemberontakan radikal dalam melawan agama dan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya,

(Maryam, 1977). Dalam hal ini modernisme seakan menjadi sebuah perlawanan bagi mereka yang menginginkan kebebasan tanpa terkekang dan mengikuti kepatuhan dalam agama. Begitu pula menurut pandangan Muhammad 'Abid al-Jabiry yang secara substansi beliau mengemukakan bahwa modernisme sebagai pembrontakan yang terdiri di masa lalu dan masa kini, guna untuk menciptakan se bentuk tradisi baru (Hanafi, 2003).

Secara terminologis, modernisasi diartikan sebagai perubahan, dari keadaan yang tradisional menuju kepada suatu masyarakat yang modern atau maju. Namun di satu sisi istilah modernisasi atau modernisme ini juga dapat diartikan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam melakukan penganalisaan muatan substansi pemahamannya, dengan begitu penggunaan dan pemakaian kata modernisme ini bergantung dari siapa penulis atau pelakunya.

Pengertian Sekulerisme

Sekulerisme berasal dari kata *saeculum* yang berarti waktu atau masa, atau tempat tertentu (Jamaluddin, 2013). Akar sejarah munculnya sekulerisme sendiri berasal dari masa Yunani dan Romawi kuno dan agama-agama yang percaya kepada Dewa dahulu, hingga berkembang pada masa *aflarung* (pencerahan) saat gereja berkuasa di Eropa, dimana gerakan ini bangkit untuk menghilangkan hubungan agama dengan kehidupan sosial dan pemerintahan (Syafi'i, 1985). Dalam proses ini, masyarakat menjadi cenderung mengutamakan kehidupan materi daripada spiritual. Menurut Sayyed Hosein Nasr, sekulerisasi juga telah berhasil menghilangkan dimensi spiritualitas dari berbagai aspek pemikiran dan kehidupan manusia (Rai & Rifat, 2024).

Pemikiran sekuler sendiri muncul dari Barat dengan Kristen sebagai agama yang melatarbelakangi munculnya pemikiran tersebut. Namun seiring berjalannya waktu hal ini menjadi sebuah persoalan jika pemahaman ini juga melanda masyarakat muslim, hal ini tidak terlepas dari propaganda yang telah dilakukan kelompok sekuler itu sendiri, dalam tingkat kebohongan akademik istilah sekuler sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan "*ilmaniyah*" yang diambil dari kata "*ilm*" (Muslim, 2002).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, arti dalam bahasa Arab sekulerisme sejatinya bukanlah "*al-'Ilmaniyyah*", melainkan "*al-Ladiniyyah*" atau "*al-La'aqidah*", dan penggunaan "*al-'Ilmaniyyah*" sendiri adalah untuk mengelabui umat Islam, karena jika diterjemahkan kepada "*al-Ladiniyyah*" atau "*al-La'aqidah*", umat Islam pasti akan langsung menolaknya. Dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi sendiri, sungguh jahatlah penterjemahan arti sekuler ini kepada istilah "*al-'Ilmaniyyah*" (Qardhawi, 2006). Sekulerisme dalam Islam dipandang sebagai konsep yang tidak memiliki dasar yang kuat, baik dalam konsep maupun praktiknya, seiring waktu pemahaman ini semakin kompleks dan menjadi perdebatan di kalangan umat Islam sendiri. Dalam sebuah proses sosial, sekulerisasi juga berusaha menyingkirkan perang otoritas keagamaan dalam sendi kehidupan manusia (Tomo, 2004). Maka dari itu, seorang individu atau masyarakat bisa menjadi sekuler ketika agama yang dianutnya termarginalkan dalam kehidupannya pula, hingga percaya bahwa segala persoalan sosial masyarakat harus terbebas dari segala dogma-dogma agamanya.

Kaitannya dalam ranah institusi Daulah Turki Utsmani yang kala itu aturan politiknya masih berlandaskan kepada hukum-hukum Islam juga berakhir harus mengusung ide sekuler ini, sehingga sejak saat itu penerapan hukum-hukum Islam tidak lagi bisa dijalankan sepenuhnya. Islam hanya menjadi sebatas ibadah ritual semata bagi masing-masing penganutnya. Sejak keruntuhan Daulah Turki Utsmani hingga saat ini, sekulerisme telah menjadi sebuah gerakan yang menyeru pada konsep kehidupan tanpa adanya campur tangan

agama (AMY, 2002). Formulasi ide sekulerisme telah menegaskan bahwa antara agama dan negara juga merupakan entitas yang berbeda dan terpisah.

Sejarah Singkat Daulah Turki Utsmani

Daulah Turki Utsmani pertama kali didirikan dari suku *Oghuz* yang dahulu pernah bermukim di wilayah Mongol, sekitar abad ke-9 mereka banyak masuk Islam. Namun setelah itu mereka berada di bawah tekanan bangsa Mongol dan terusir dari kampung halamannya, sehingga berpindah ke Asia Tengah pada abad ke-13 M. Menetap berdampingan dengan masyarakat dari Turki Saljuk, berada di dataran yang lebih tinggi di Asia Kecil di bawah pimpinan Ertugul. Mereka pun berakhir ikut bergabung membantu Sultan Alaidin II yang juga sedang melawan Binzantium kala itu. Dan mereka pun mendapat kemenangan, dalam kepemimpinan Sultan Alaidin II memberikan sebidang tanah kepada suku *Oghuz* tersebut di bagian Asia Kecil bagian dari wilayah kota Binzantium. Sejak itulah mereka membangun wilayah baru dan mendirikan ibu kota di *Söğüt*.

Kemudian pada tahun 1289 M, sepeninggal Ertugurul kepemimpinan dilanjutkan anaknya yakni Utsman bin Ertugrul sejak tahun 1290-1326 M, dimana dia juga berhasil membantu Sultan Alaidin II, saat bangsa Mongol menyerang Daulah Turki Saljuk kala itu, namun pada akhirnya Sultan Alaidin juga terbunuh, sehingga kedudukan Sultan digantikan oleh Utsman bin Ertugrul, ia berkuasa penuh atas daerah-daerah dalam kekuasaan Daulah Turki. Maka sejak saat itulah Daulah Turki di sebut dengan Daulah Turki Utsmani yang berdiri di Asia Kecil dengan Utsman bin Ertugrul atau disebut Utsman I sebagai pemimpin pertamanya (Syamruddin, 2013). Lebih dari 6 abad berdiri, Daulah Turki Utsmani memiliki 37 Sultan yang pernah memimpin, yaitu:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Sultan Usman I | (699-726 H) |
| 2. Sultan Orkhan I | (726-761 H) |
| 3. Sultan Murad I | (761-791 H) |
| 4. Sultan Bayezid I | (791-804 H) |
| 5. Sultan Muhammad I | (816-824 H) |
| 6. Sultan Murad II | (824-855 H) |
| 7. Sultan Muhammad II (Al-Fatih) | (855-886 H) |
| 8. Sultan Bayezid II | (886-918 H) |
| 9. Sultan Salim I | (918-926 H) |
| 10. Sultan Sulaiman I (Al-Qanuni) | (926-974 H) |
| 11. Sultan Salim II | (974-982 H) |
| 12. Sultan Murad III | (983-1003 H) |
| 13. Sultan Muhammad III | (1003-1012 H) |
| 14. Sultan Ahmad I | (1012-1026 H) |
| 15. Sultan Mustafa I | (1026-1027 H) |
| 16. Sultan Usman II | (1027-1031 H) |
| 17. Sultan Murad IV | (1032-1039 H) |
| 18. Sultan Ibrahim I | (1049-1058 H) |
| 19. Sultan Muhammad IV | (1058-1099 H) |
| 20. Sultan Sulaiman II | (1099-1102 H) |
| 21. Sultan Ahmad II | (1102-1106 H) |
| 22. Sultan Mustafa II | (1106-1115 H) |
| 23. Sultan Ahmad III | (1115-1143 H) |

24. Sultan Mahmud I	(1143-1168 H)
25. Sultan Usman III	(1168-1171 H)
26. Sultan Mustafa III	(1171-1187 H)
27. Sultan Abdul Hamid I	(1187-1203 H)
28. Sultan Salim III	(1203-1222 H)
29. Sultan Mustafa IV	(1222-1223 H)
30. Sultan Mahmud II	(1223-1255 H)
31. Sultan Abdul Majid I	(1255-1277 H)
32. Sultan Abdul Aziz	(1277-1293 H)
33. Sultan Murad V	(1293-1293 H)
34. Sultan Abdul Hamid II	(1293-1328 H)
35. Sultan Muhammad V	(1328-1337 H)
36. Sultan Muhammad VI (Wahiduddin)	(1328-1337 H)
37. Sultan Abdul Majid II	(1340-1343 H)

Modernisme dan Sekulerisme Daulah Turki Utsmani

Daulah Turki Utsmani mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Sulaiman I Al-Qanuni. Terdapat berbagai pandangan yang menyatakan bahwa untuk mengatasi kemunduran yang terjadi pada Daulah Turki Utsmani kala itu, beberapa ide dan gerakan pembaruan yang bercorak sekuler dilakukan pada masa sultan-sultan yang berkuasa setelah Sulaiman I. Namun di satu sisi, alih-alih ingin memperbaiki keadaan pemerintahan, justru kerusakan demi kerusakan yang terjadi, baik secara internal dan eksternal hingga Daulah Utsmani mencapai fase keruntuhannya. Setelahnya pada tahun 1566 M, Daulah Turki Utsmani mulai memasuki fase kemundurannya. Secara berkala Daulah mengalami ketidakstabilan baik dari segi sosial, ekonomi dan politik, bahkan semakin melemah yang akhirnya mengalami keruntuhan pada tahun 1924 M. Ada beberapa catatan sejarah penyebab kemunduran kekuasaan daulah Turki Utsmani, antara lain:

- a. Wilayah kekuasaan yang sangat luas, sehingga administrasi pemerintahan menjadi sangat rumit dan kompleks. Administrasi pemerintahan juga sedang tidak baik dan terlibat dengan perang yang berkepanjangan.
- b. Heterogenitas penduduk dengan jumlahnya yang besar sebagai konsekuensi kekuasaan yang amat luas. Pengelolaan pendudukan yang heterogen baik secara agama, kultur maupun etnis, diperlukan organisasi pemerintahan yang teratur. Heterogenitas hanya menjadi beban dan menimbulkan pemberontakan dan peperangan.
- c. Adanya kelemahan dari para Sultan sepeninggal Sultan Sulaiman I, dimana Daulah Turki Utsmani kemudian diperintah oleh para Sultan yang lemah, akibatnya sistem pemerintahan menjadi kacau dan tidak dapat diatasi.
- d. Budaya korupsi dan pungli terjadi dimana-mana bahkan membayar untuk menduduki jabatan pemerintahan bisa terjadi kepada pejabat yang berwenang. Dampaknya adalah lahirnya dekadensi moral di lingkungan istana dan masyarakat.
- e. Adanya pemberontakan yang dilakukan beberapa kali oleh tentara *Jennisari*, dimana kondisi ini juga turut melemahkan kekuasaan Sultan.
- f. Merosotnya ekonomi yang diakibatkan oleh perang berkepanjangan. Pendapatan negara semakin berkurang dan kebutuhan belanja termasuk belanja untuk kebutuhan perang kian meningkat, akibatnya kondisi ekonomi negara menjadi lemah.

g. Pengambilan skala prioritas negara yang Nampak stagnan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara lebih mengedepankan pengembangan kemiliteran yang tidak diimbangi dengan teknologi, sehingga persenjataannya kalah dengan teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa. Dengan kondisi yang demikian lemah, maka penjajahan juga terjadi di wilayah kekuasaan Turki Utsmani (Khoiro, 2021).

Pemerintahan Turki Utsmani sebenarnya tidak lagi berjalan dengan efektif semenjak berada di bawah kepemimpinan Sultan Salim II (1566-1574), Sultan Salim II juga tidak memiliki kemampuan yang baik untuk melanjutkan penaklukan-penaklukan seperti yang dilakukan ayahnya Sultan Salim I, dimana dalam beberapa catatan sejarah dia lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam istana Topkapi (John, 2012). Sultan Salim II juga yang awal mula membuka peluang kepada pihak Eropa untuk bisa memasuki wilayah kekuasaan Daulah Turki Utsmani. Maka dari itu tidak heran jika banyak sejarawan yang mengatakan bahwa awal periode kemunduran Daulah Turki Utsmani dimulai sejak masa pemerintahan Sultan Salim II.

Hal ini juga yang menjadi awal longgarnya sistem Daulah Turki Utsmani sehingga memberikan kesempatan bagi para antek-antek sekuler memasuki ruang internal pemerintahan. Sepeninggal kepemimpinan Sultan Salim II, kondisi pemerintahan juga semakin tidak terkendali dimana Daulah Turki Utsmani diwarnai dengan banyaknya pemberontakan, kekalahan perang, intervensi negara-negara Eropa, dan konspirasi gerakan bawah tanah (*clandes tine*), (Deden, 2017). Hal ini diperparah dengan kepemimpinan sultan-sultan yang juga lemah setelahnya, yakni dari fase kepemimpinan Sultan Murad III sampai dengan Sultan Murad V.

Sejak era Revolusi Perancis sampai di penghujung tahun 1830-an Daulah Turki Utsmani sendiri telah mengalami banyak perubahan dalam segala aspek bidang, dan sebagian besar aspeknya berkaitan dengan perubahan hubungannya dengan Eropa (Intan, 2019), terutama dalam bidang politik negara sebagai upaya modernisasi dan sekulerisasinya, namun di sisi lain hal ini dikatakan sebagai pembaharuan oleh para penguasanya.

Pada masa kepemimpinan Sultan Salim III, Daulah Turki Utsmani disibukkan perang dengan kekaisaran Rusia, akibat pertempuran yang berlarut-larut dengan kekaisaran Rusia tersebut dan lemahnya kepiawaian Sultan Salim III dalam menangani situasi ini, pada akhirnya perang berakhir di tahun 1774 M (Nicko, 2021), namun Daulah Turki Utsmani juga harus menerima juru penengah yakni Inggris dan Perancis. Lalu dari hal ini menghasilkan perjanjian *Jassy* yang pada dasarnya adalah perjanjian *Kucuk Kaynarca* yakni perolehan teritorial tambahan bagi Rusia di pantai Laut Hitam (Erik, 2003). Dimana sebenarnya hal ini juga merupakan upaya Barat agar bisa memisahkan potensi spiritual dan politik dalam kekuasaan Daulah Turki Utsmani yang berlandaskan Islam. Karena dengan pemisahan antara kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik ini, negara-negara Eropa kemudian berhasil memposisikan jabatan Sultan setara dengan kedudukan Paus dalam agama Khatolik, yakni dimana peran Sultan hanya sebagai pelaksana kekuasaan rohani semata atau pengatur hukum Islam kala itu. Dan akibatnya negara-negara Eropa yang menjajah wilayah-wilayah Islam juga bisa mendalihkan bahwa mereka adalah penguasa yang sah atas kaum Muslim secara politik atau duniawi (Nicko, 2021).

Upaya sekulerisasi dalam pembaharuan pertama yang dilakukan oleh Sultan Salim III disebut dengan reformasi *Nizam-I Cedid* (orde baru) pada kurun waktu 1789-1807 M. Namun reformasi tersebut terinspirasi oleh model-model Barat, dan dalam penerapannya Salim III sangat bergantung pada bantuan Perancis, khususnya pada instruktur di sekolah-sekolah militernya. Di masa pemerintahannya Sultan Salim III sudah menunjukkan perhatiannya kepada dunia Eropa, ia juga berkorespondensi dengan Raja Luois XVI di Perancis, dan dalam

model pemerintahannya ia mengumpulkan orang-orang disekitarnya dari gagasan-gagasan yang juga bersifat ke-Eropa-an dengannya (Intan, 2019). Berbagai reaksi perdebatan dan pemberontakan dari para tokoh dan ulama kala itu muncul untuk menghentikan upaya *Nizam-I Cedit* tersebut dari Sultan yang cenderung dengan ide-ide Barat dan bersifat sekuler.

Upaya pembaharuan bersifat sekuler juga dilakukan kembali oleh Sultan Mahmud II, dimana pembaruan dipusatkan pada berbagai perubahan internal, terlebih pada organisasi pemerintahan dan hukum. Pada masa inilah urusan agama benar-benar dipisahkan dengan urusan politik. Urusan agama diatur oleh syari'at Islam (*tasyr' al-dini*) sedangkan urusan dunia diatur oleh hukum yang bukan syari'at (*tasyr' madani*). Hukum syari'at berada di bawah kekuasaan syaikh al-Islam, sedangkan hukum politik diserahkan kepada dewan perancang hukum. Hukum politik yang diadopsi dari Barat diantaranya adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Peradilan Perdata (*Nizham al-Qadha al-Madani*). Kemudian muncul *Mahkamah al-Nizhamiyah* yang terdiri dari Peradilan Perdata (*Qadha al-Madani*) dan Peradilan Agama (*Qadha Syar'i*), (Ilyas, 2014). Dikotomi peradilan pada masa Sultan Mahmud II ini telah memberikan indikasi adanya sekulerisme atau pemisahan urusan agama dan urusan politik dalam Daulah.

Masuk pada era kepemimpinan Sultan Abdul Majid I, dimana kekuasaan Sultan juga semakin dikebiri dalam pengaturan politiknya. Sultan Abdul Majid I melakukan pembaharuan *Tanzimat* (reformasi), namun undang-undang yang diberlakukannya juga banyak terinspirasi dari Barat. Dalam politik luar negerinya Sultan Abdul Majid I bahkan mengajukan agar Daulah Utsmani bergabung menjadi bagian dari keluarga Eropa (*famille europeene*), (Nicko, 2021). Sebagai syarat, Eropa meminta agar Daulah Turki Utsmani harus meninggalkan Islam sebagai dasar hukum dan hubungan internasionalnya, sebagai gantinya Daulah harus menganut "hukum publik Eropa" (*du droit public europeen*). Gerakan *Tanzimat* ini berhasil diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Daulah Turki Utsmani. Dekrit *Tanzimat* dirancang oleh Mustafa Resyid Pasha yang menjabat sebagai Perdana Menteri Sultan Abdul Majid I kala itu. Akhirnya pembaharuan tersebut dimulai dengan adanya deklarasi piagam *Gulkhane* pada tanggal 3 November 1839. Isi yang menjadi poin penting dari piagam tersebut diantaranya yaitu:

1. Orang yang tertuduh akan diadili secara terbuka dan sebelum ada putusan pengadilan, pelaksanaan hukuman mati tidak diperbolehkan.
2. Pelanggaran terhadap kehormatan seseorang tidak diperbolehkan dan hak milik terhadap harta akan dijamin, serta setiap orang mempunyai kebebasan terhadap harta yang dimilikinya.
3. Ahli waris yang terkena hukuman pidana tidak boleh dicabut haknya untuk mewarisi, dan begitu pula harta yang terkena hukuman pidana tidak boleh disita.
4. Semua pegawai pemerintahan menerima gaji yang sepadan dengan tugasnya, maka dikeluarkan undang-undang terhadap korupsi.
5. Seluruh umat beragama, baik muslim maupun non-muslim akan berada dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum.
6. Kriminalisasi atau hukuman atas perilaku homoseksual dihapuskan.

Poin ke-enam hal yang menjadi sangat kontroversi, karena selain sangat bertentangan dengan hukum atau syari'at Islam, juga berarti bahwa Turki Utsmani harus menghapus kriminalisasi homoseksual 32 tahun lebih dulu dari Inggris, dan 145 tahun lebih dulu dari Amerika. Sungguh keadaan Daulah Utsmani telah sangat mengkhawatirkan atas rusaknya hukum dan pemisahan syari'at Islam dalam dunia politik.

Pada era kepemimpinan Sultan Abdul Aziz, Daulah Utsmaniyah secara terang semakin menunjukkan sikap-sikap sekulerismenya, pada tahun 1856 Sultan memberikan dukungan penuh kepada Eropa dan berhasil ikut bergabung ke dalam *famille europeene* atau keluarga

Eropa, dimana elite-elite Daulah juga mengubah struktur pemerintahan negarnya menjadi sistem monarki parlementer seperti halnya negara-negara Eropa lainnya saat itu. Dalam hal ini terbentuklah kementerian yang dipimpin oleh *Sadr-i Azam* yang identikkan seperti halnya jabatan Perdana Menteri di dalam sistem pemerintahan Barat, sehingga dengan begitu kekuasaan Sultan dibatasi oleh dewan kementerian (Nicko, 2021).

Upaya besar untuk memperbaiki keadaan pemerintahan kembali dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II selama 33 tahun. Dalam kekuasaan beliau bersikap tegas untuk merespon kondisi masa pemerintahannya tersebut dan harus berpijak pada segala pengaruh sekulerisme politik yang sangat darurat kala itu. Tokoh-tokoh sekuler dari kalangan terpelajar Turki Utsmani dengan pemikiran yang telah dipengaruhi oleh Revolusi Perancis banyak bermunculan di masa pemerintahan beliau, seperti Namik Kemal, Midhat Pasha, Ibrahim Taimu, Dhiya Pasha, dan Ali Syafaqat Bek. Mereka inilah embrio dari Gerakan Utsmani Muda, Turki Muda dan Komite Persatuan dan Kemajuan, yang kemudian akan meruntuhkan Daulah, dimana mereka juga terhubung dengan gerakan *Freemasonry* (Deden, 2016). Oleh sebab kuatnya pengaruh tokoh-tokoh tersebut, pada akhirnya Sultan Abdul Hamid II berhasil dijatuhkan pada tahun 1909 M melalui serangkaian konspirasi dan revolusi.

Setelahnya Turki Utsmani berhasil dikuasai oleh kelompok sekuler yang disebut sebagai organisasi Komite Persatuan dan Kemajuan (Deden, 2016). Kemudian kepemimpinan beralih kepada Sultan Muhammad V, namun peran Sultan Muhammad V benar-benar sudah tidak lagi memiliki wibawa dan kekuatan dalam kedudukannya. Kedudukan sultan hanya dijadikan sebagai simbol belaka, karena jaringan internal pemerintahan telah banyak diisi dan dimotori oleh kelompok sekuler yang terbentuk melalui organisasi Komite Persatuan dan Kemajuan. Dimana komite tersebut dipimpin oleh Ahmet Riza Bey dan yang mengendalikan sepenuhnya kekuasaan. Gagasan-gagasan mereka berhasil mendapat kekuasaan melalui anggota-anggota partai yang berkuasa dan para pendukungnya, mereka beranggapan bahwa Islam tidak sesuai untuk masa sekarang, dan hanya pemikiran dan budaya Baratlah yang paling sesuai (Zallum, 2023).

Sejak Agustus 1909, Turki Utsmani benar-benar telah memasuki periode konstitusional dengan sistem parlementer, dimana Sultan Muhammad V semakin tidak berdaya saat anggaran belanja dipotong dan ada 10.000 perwira istana diberhentikan dari jabatannya (Erik, 2003). Pada saat yang sama muncullah kelompok oposisi pemerintah, mereka adalah para mantan Komite Persatuan dan Kemajuan yang menganut paham yang lebih liberal dan konservatif, dimana secara perlahan kelompok ini juga membentuk partai-partainya sendiri hingga dapat mengimbangi dominasi kelompok Komite Persatuan dan Kemajuan dalam pemerintahan. Selama rentang tahun 1909-1911 kelompok-kelompok oposisi ini telah membentuk partai-partai baru diantaranya:

- a. *Mutedil Hurriyetperveren Firkasi* (Partai Orang-Orang Liberal Moderat)
- b. *Islahat-i Esaiye-i Osmaniye Firkasi* (Partai Pembaruan Utsmani Fundamental)
- c. *Ahali Firkasi* (Partai Rakyat)
- d. *Hizxx zb-i Cedit* (Partai Baru)
- e. *Osmanli Sosyalist Firkasi* (Partai Sosialis Utsmani)

Semakin banyaknya orang-orang yang bergabung dalam kelompok oposisi, pertarungan politik antara Komite Persatuan dan Kemajuan dengan kelompok oposisi pun terus berlanjut dalam tubuh Daulah Turki Utsmani tanpa adanya peran Sultan Muhammad V, dan saat itulah kondisi politik Internasional Turki Utsmani memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Pada tanggal 17 oktober 1912, Turki Utsmani akhirnya menandatangani perjanjian dengan Italia untuk menyerahkan wilayah Tripolitania (Libya) dan Dodecanes sebagai konsekuensi dari kekalahannya dalam pertempuran (Erik, 2003).

Kemudian di masa kepemimpinan terakhir yakni Sultan Abdul Majid II, dimana ia harus berhadapan dengan segala bentuk perlawanan dan kekuasaan Turki Muda dan Utsmani Muda dalam hubungan internasionalnya. Berakhir tepat pada tanggal 3 Maret 1924 M, Daulah Turki Utsmani berubah menjadi Republik Turki atas kepemimpinan Mustafa Kemal Attaturk. Dengan keputusan itu Sultan Abdul Majid dan keluarganya diruntuhkan dari jabatannya, bahkan dikatakan harus meninggalkan Negara Turki kala itu (Sakinah, 2019). Pada sisi lain, hal ini menjadi sebuah takdir dimana peradaban Islam juga harus mengalami fase keruntuhan dan kemundurannya, sehingga beralih ke masa kekuasaan sekuler kediktatoran. Namun kesadaran dan keimanan dalam masyarakat muslimnya sejak dahulu hingga saat ini masih berpegang teguh terhadap ajaran Islam, sebagai agama yang penuh rahmat bagi seluruh alam. Modernisme dan sekulerisme yang terjadi dalam panggung politik negara tidak sepenuhnya dapat memisahkan keimanan kaum muslim dari ajaran Islam yang benar, dan akan selalu ada orang-orang yang menjadi pembawa perubahan dalam setiap masa.

Turki Utsmani Era Mustafa Kemal

Masuk dalam era kekuasaan para kelompok-kelompok reformasi Turki Muda, di satu sisi Islam terancam ingin dipisahkan dari sistem pemerintahan atau hal-hal yang bersifat duniawi. Kondisi ini kemudian memunculkan karakter tersendiri di kalangan masyarakat Muslim Turki, mereka terbagi menjadi dua kubu pemikiran, yakni mereka yang cenderung moderat dan mereka yang bertahan dengan pemikiran Islam sebagai aturan Politik. Sehingga memunculkan sudut pandang pro dan kontra mengenai pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk ini, yaitu menurut pandangan nasionalis Turki dan politik Islam.

1. Mustafa Kemal Attaturk dalam Sudut Pandang Islam

Berbagai tulisan khususnya dari perspektif para cendekiawan muslim dan ulama yang memiliki spirit Islam dan menentang sekulerisme menganggap bahwa Mustafa Kemal Attaturk sebagai tokoh nasionalis pengagung Barat. Modernisasi yang dilakukannya pada Turki kala itu dianggap sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Saw, dengan membawa dogma-dogma sekuler baru yang ingin menggantikan Islam dalam sistem negara (Sakinah, 2019). Ruang gerak Islam menjadi sangat terbatas melalui peraturan-peraturan pemerintah yang di buat.

Islam yang kala itu dirasa tidak relevan lagi sebagai dasar kebijakan pemerintahan dan terjadi perbedaan pendapat terkait ide-ide pembaharuan politiknya. Walau di tengah eksistensi ide sekulerisme yang sedang naik daun, namun sebagian masyarakat Turki masih meyakini bahwa Islam tetap menjadi dasar bagi sistem sosial dan ritual agama. Hanya saja kekuatan dalam ranah politik negara, Islam sudah tidak lagi digunakan dan terpisahkan. Dari kelompok Religius Islam, yakni mereka yang memilih politik sebagai jalan perjuangan serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam tidak hanya dalam ranah sosial dan ritual saja, namun juga ranah politik negara (Rofii, 2019). Bagi penduduk Turki yang juga mayoritas beragama Muslim, mereka masih tidak bisa menjadikan Islam sebagai inspirasi perjuangan dalam berpolitik, karena ketatnya penjagaan sekulerisme oleh negara.

2. Mustafa Kemal dalam Sudut Padang Nasionalis

Melalui para nasionalis Turki sendiri mereka menganggap jika apa yang telah dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk merupakan sebuah pembaharuan yang bijak. Beberapa para ahli seperti mengatakan bahwa sesungguhnya sekulerisme yang dibawa Mustafa Kemal tidaklah bermaksud untuk menghilangkan Islam dari masyarakat Turki, namun hanya dalam upaya menghilangkan kekuasaan agama atas negara dari segi bidang politik dan pemerintahan saja. Ada pula yang menilai jika Mustafa Kemal ingin mengadakan rasionalisasi agama dalam politik, agama masih menjadi kekuatan penopang bagi kemajuan Turki (Alfian, 2015).

Pada masa revolusi Mustafa Kemal Attaturk, hal yang sangat menonjol adalah dimana dia menjadikan bentuk negara yang diinginkan dengan mengubah kedaulatan ada di tangan rakyat (demokratis), (Nasution, 1975). Literatur Nasionalis menyebutkan jika republik Turki yang dibangun adalah negara sekuler tetapi walau demikian apa yang diciptakan Mustafa Kemal belum menjadi negara yang betul-betul sekuler. Dimana republik Turki masih mengurus agama melalui Departemen urusan agama, sekolah-sekolah untuk imam, khatib, fakultas dan Universitas. Dimata para pembaharunya, Islam juga merupakan adalah agama yang rasional, mereka beranggapan bahwa penyebab mundurnya Turki Utsmani kala itu juga adalah karena terlalu berpegang pada syari'at yang dipengaruhi oleh budaya Arab, sehingga dianggap sudah tidak lagi cocok dengan bumi Turki dan zaman yang modern (Sakinah, 2019). Maka pembaharuan dengan mengikuti gaya pemerintahan Barat dianggap tidak sepenuhnya menjadikan keterbelakangan, karena usaha Mustafa Kemal ini menjadi suatu jalan terbaik demi membawa pengaruh modern di Turki. Maka dalam pandangan Nasionalisme sendiri Mustafa Kemal dianggap sebagai pembawa pembaharuan modern dalam roda pemerintahan.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa upaya modernisme dan sekularisme pada Daulah Turki Utsmani sudah terjadi di beberapa masa pemerintahan Kesultanan Daulah Utsmani sebelum mencapai era Mustafa Kemal Attaturk, sehingga seiring waktu sistem pemerintahan Daulah Utsmani pun berubah, yang asalnya masih berlandaskan pada sistem pemerintahan berdasarkan Syari'at Islam berubah menjadi sistem Republik Turki di era Mustafa Kemal, yang dianggap bertujuan untuk merubah dan memperbaiki stabilisasi daulah Turki Utsmani yang pada saat itu mulai mengarah pada kemunduran. Karena di satu sisi Daulah juga sedang mengalami berbagai dilema baik secara internal dan eksternal untuk bisa mempertahankan aturan Islamnya, sehingga upaya yang akhirnya dilakukan tidak ada lagi selain menghilangkan sebagian aturan Islam dalam politik (modernisme dan sekularisme) yang di tawarkan oleh Barat, dan demi untuk mempertahankan kondisi masyarakat Turki yang juga sedang dilanda berbagai krisis dan kekalahan perang kala itu. Sekularisme yang terjadi hanya di dalam lingkup aturan pemerintahan, namun Islam masih menjadi aturan sosial dan agama yang kuat dalam masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi. Yusuf. (2006). *Islam dan Sekularisme*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alfian, M. Alfian. (2015). *Istanbul: Kota Sejarah dan Geliat Turki Modern*. Bekasi: PT Penjuru Ilmu Sejati.
- AMY. (2002). *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, Akar Ideologis dan Penyebarannya*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Esposito, John L. (1992). *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. New York: Oxford University Press.
- Engku, Iskandar, dan Siti Zubaidah. (2014). *Sejarah Pendidikan Islami*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Firdaus. (2018). Modernisme. *Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 41-55.
- Freely, Jhon. (2012). *Istanbul Kota Kekaisaran*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Hadiwijono, Harun. (1980). *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hanafi, Hasan, dan Muhammad 'Abid al-Jabiry. (2003). *Membunuh Syetan Dunia Meleburkan ke Timur dan Barat dalam Cakrawala Kritik dan Dialog*. Yogyakarta: IRCiSiD.

- Herdiansyah, Deden A. (2016). *Di Balik Runtuhnya Turki Utsmani*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Herdiansyah, Deden A. (2017). *Jejak Kekhalifahan Turki Utsmani di Nusantara*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Ilyas, Muhtarom. (2014). Tiga Aliran Pembaruan (Westernisme, Islamisme, dan Nasionalisme). *Jurnal Sosial Humaniora*, 265-273.
- Jamaluddin. (2013). Sekularisme; Ajaran dan Pengaruhnya dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Mudarrisuna*, 309-327.
- Jameelah, Maryam. (1977). *Islam and Modernism*. Lahore: Islamic Publication.
- Jakub, Ismail. (1970). *Orientalisme dan Orientalisten*. CV. Faizan: Surabaya.
- Jahra, Nisrina Rai, dan Muhammad Yalda Rifat Surya. (2024). Islam dan Sekulerisme dalam Al-Qur'an. *An Najah; Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Agama*, 137-145.
- Maarif, Ahmad Syafii. (1985). *Al-Qur'an, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi)*. Bandung: Pustaka.
- Nasution, Muslim. (2002). Al-Muqawwimalal-FikriyyahLi al-'ilmaniyya. *Jurnal Al-Jami'ah*, 175-209.
- Nasution, Syamruddin. (2013). *Sejarah Peradaban Islam*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau.
- Nasution, Harun. (1975). *Pembaharu dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Parangrangi, Tomo. (2004). Sekulerisme dalam Perkembangan Islam". *Jurnal IAIN Kediri*, 12-18.
- Pandawa, Nicko. (2021). *Khilafah dan Ketakutan Para Penjajah Belanda; Riwayat Pan-Islamisme dari Istanbul sampai Batavia 1882-1928*. Bogor: Komunitas Literasi Islam.
- Prinita, Brigida Intan. (2019). *Sejarah Asia Barat Modern: Dari Nasionalisme Sampai Perang Teluk ke-III*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama.
- Qur'ani, Hafizatul, Misri A. Muchsin, dan M.Thalal. (2024). Penghargaan Turki atas Mustafa Kemal Ataturk. *Proceedings of International Conference on Islamic Studies*, 398-416.
- Rofii, M. Sya'roni. (2019). *Islam di Langit Turki*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Syauqi, Abrari. (2016). *Sejarah Peradaban Islam*. Banjarmasin: ASWAJA PRESSINDO.
- Sujarweni, Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis & Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Tim Spirit Turki. (2020). *Turki yang Sekuler: Di Tengah Kepungan Islamisme dan Politik Identitas*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ummatin, Khoiro. (2021). *Peradaban Islam: Penelusuran Jejak Sejarah*. Solo: Kurnia Kalam Semesta.
- Warrahmah, Sakinah Mawaddah. (2019). *Masa Pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk di Republik Turki 1923-1938*. Jakarta: UIN Syarifhidayatullah Jakarta.
- Zallum, Abdul Qadim. (2023). *Malapetaka Runtuhnya Khilafah*. Bogor: Al Azhar Press.
- Zurcher, Erik J. (2003). *Sejarah Modern Turki*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.